



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 194/520/ TAHUN 2021

TENTANG  
PENETAPAN KELOMPOK LUMBUNG PANGAN SASARAN PENERIMA BANTUAN  
PENGADAAN BERAS UNTUK PENGISIAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah khususnya pengadaan beras untuk pengisian Lumbung Pangan Masyarakat merupakan upaya untuk menjamin akses dan kecukupan pangan anggotanya terutama yang mengalami kerawanan pangan serta untuk mendukung tersedianya cadangan pangan masyarakat;
  - b. bahwa pengadaan beras untuk pengisian Lumbung Pangan Masyarakat sebagaimana huruf a, diberikan kepada kelompok lumbung pangan yang dipandang tepat dan mampu untuk menerima dan mengelola bantuan serta melaksanakan kegiatan tersebut, berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor 01/BAHV/DISPANG/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021;
  - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Lumbung Pangan Sasaran Penerima Bantuan Pengadaan Beras untuk Pengisian Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Daerah Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Kelompok Lumbung Pangan Sasaran Penerima Bantuan Pengadaan Beras untuk Pengisian Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Kelompok Lumbung Pangan Sasaran sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban memanfaatkan dan mengelola bantuan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2021 serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 28 Juli 2021

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 194/520/TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK LUMBUNG PANGAN SASARAN PENERIMA BANTUAN PENGADAAN BERAS UNTUK PENGISIAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR KELOMPOK LUMBUNG PANGAN PENERIMA BANTUAN

NO	KAMPUNG / KECAMATAN	NAMA KELOMPOK LUMBUNG PANGAN	KETUA KELOMPOK LUMBUNG PANGAN	JENIS BANTUAN	ANGGARAN (RP)
1.	KAMPUNG LELIPANG KECAMATAN TAMAKO	SESUNDUANG	ALWIN KAENGKE	BERAS	RP. 3.497.000,-
2.	KAMPUNG BEHA KECAMATAN TABUKAN UTARA	MAKMUR	RABIUL I. TARIMAKASE	BERAS	RP. 6.500.000,-

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA